BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinamika konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Temon disebabkan karena adanya kebijakan rencana pembangunan banadara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Konflik agraria yang terjadi terwujud pada faktor perbedaan pandangan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan PT. Angkasa Pura I dalam memanfaatkan serta memperuntukan fungsi tanah seluas 645,36 hektar yang saat ini menjadi objek sengketa. Masalah konflik agraria telah dialami masyarakat dan pemerintah daerah dalam kurun waktu yang cukup lama apabila dihitung dari tahun 2012. Dalam konteks tahun tersebut, pada tanggal 9 September 2012 masyarakat membentuk organisasi Wahana Tri Tunggal (WTT) untuk melakukan perlawanan dan menolak adanya rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon, karena rencana pembangunan bandara akan berdampak pada hilangnya lahan pertanian sebagai sumber penghidupan masyarakat.

Dalam konflik agraria ini, ada masyarakat yang memiki keinginan untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak milik atas tanah sebagai

sumber pendapatan ekonomi mesti dalam perjalanannya mereka selalu mengalami kendala-kendala dalam proses perjuangan menghadapi kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, patut diketahui bahwa konflik yang mencul berdampak sistematis terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Temon. Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya sumber ekonomi masyarakat yaitu hak milik atas tanah. Karena masyarakat memanfatkan dan mengelolah tanah di Kecamatan Temon sebagai lahan pertanian dan mengunakan tanah tersebut sebagai lapangan pekerjanan dibidang pertanian dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika masyarakat kehilangan sumber ekonomi mereka, maka masalah yang akan terjadi adalah meningkatnya jumlah masyarakat miskin akibat tidak mendapatkan lapangan pekerjaan atau pengangguran, karena persaingan masyarakat dalam mencari kerja semakin meningkat sedangkan penerimaaan pekerjaaan semakin sedikit. Selain itu di Kebupaten Kulon Progo akan mengalami kekurangan lahan pertanian sehingga berdampak pada menurunya produksi pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Timbulnya rasa cemas dalam pikiran masyarakat di Kecamatan yang terlibat dalam konflik akibat tindakan kekerasan yang dialami mereka. Dampak ini merupakan masalah psikologis

masyarakat setelah mendapatkan perlakukan yang kurang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

3. Timbulnya masalah komunikasi dan interaksi yang terjalin antara masyarakat dengan masyarakat semakin memburuk dan kurang baik lagi, serta menimbulkan ketidakharmonisnya hubungan yang terbangun antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo terutama Pemerintah Desa.

Dapat dilihat dan dianalisis mengenai dampak-dampak konflik agraria yang dialami masyarakat di Kecamatan Temon, tepatnya di Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo. Masyarakat di lima desa terdampak koflik tersebut di atas berada di wilayah pesisir Kecamatan Temon. Dampak ekonomi, dampak psikologis, dan dampak sosial budaya menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo belum melakukan upaya yang baik dalam menangani konflik agraria di Kecamatan Temon. Karena pihak Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga mempertimbangkan kelancaran rencana pembangunan bandara NYIA yang menjadi proritas utama dari kebijakan pemerintah pusat di Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) dan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kulon Progo. Sehingga ada beberapa kepentingan masyarakat yang menjadi persoalan penting yang masih dikesampingkan yakni perjungan menolak pengusuran lahan pertanian di Kecamatan Temon.

Dari deskripsi singkat diatas sudah sangat jelas bahwa dinamika konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo

merupakan konflik terbuka (*Opent Conflict*) yang memiliki faktor penyebab utama yakni adanya rencana pembangunan bandaya *New Yogyakarta International Airport* (NYIA). Konflik terbuka ini mengakar secara dalam serta terlihat jelas, sehingga membutuhkan tindakan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan mengatasi penyebab-penyebab yang mengakar serta efek yang tampak dari peristiwa konflik tersebut. Dalam artiannya bahwa tindakan menyelesaikan permasalahan konflik dapat menguntungkan pihak-pihak yang berkonflik. Konflik agraria yang timbul dipermukaan sudah lama terjadi dan bahkan telah diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, namun dalam masalah ini belum segera terselesaikan. Proses penyelesian konflik pada dasarnya bukan karena ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mencari solusi untuk menyelesaikan konflik, akan tetapi disebabkan oleh faktor ketidaksesuaian atau perbedaan pesepsi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam memanfaatkan tanah di Kecamatan Temon. Masyarakat yang menolak rencana pembangunan bandara seyogyanya memiliki kepentingan yang lebih cenderung pada perjungan mempertahankan tanah atau lahan petanian di Kecamatan Temon. Namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membutuhkan tanah di lima desa yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Temon tersebut sebagai lokasi rencana pembangunan bandara NYIA.

B. Saran

Dalam penelitian yang berjudul "Dinamika Konflik Agraria Pasca Adanya Rencana Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016" terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo harus mempertimbangkan secara baik-baik proses selanjutnya dari kebijakan rencana Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kecamatan Temon, karena masyarakat belum sepenuhnya menerima kebijakan pembangunan bandara tersebut.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Hasto Wardoyo selaku Bupati Kabupaten Kulon Progo harus memikirkan upaya penyelesaian konflik yang telah terjadi di Kecamatan Temon. Penyelesaian yang nantinya dilakukan dapat menguntungkan masyarakat yang telah terdampak konflik agraria tersebut.
3. Pemerintah Daerah juga semestinya mencari sosulis yang adil dalam menyelesaikan dampak-dampak konflik yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Temon. Jika proses ini tidak dilakukan atau dibiarkan berlalur-larut dan tidak ada upaya penyelesaian, maka akan terjadi konflik vertikal yang semakin meningkat. Sehingga pada akhirnya berujung dengan gerakan perlawanan masyarakat yang semakin masif terjadi seperti halnya di daerah-daerah yang mengalami masalah pertanahan.